

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DAERAH

Alya An Nais Syakilla¹, Bela Amanda Putri², Windi Wulandari³, Renny Maisyarah⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

e-mail: alyasyakilla008@gmail.com¹, amandabela127@gmail.com², windywldri07@gmail.com³,
rennymaisyarah@gmail.com⁴

Abstrak – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Melalui laporan ini, kondisi keuangan daerah dapat diketahui secara lebih jelas, termasuk bagaimana pemerintah daerah memperoleh pendapatan, mengalokasikan belanja, serta mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki. Selain itu, LKPD juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan publik, tingkat efisiensi penggunaan anggaran hingga tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Analisis terhadap laporan keuangan daerah menjadi penting karena dapat digunakan sebagai alat untuk menilai apakah pengelolaan keuangan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan perkembangan kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah aset daerah, menurunnya kewajiban, bertambahnya ekuitas, serta perubahan kondisi anggaran yang sebelumnya mengalami defisit menjadi surplus. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah mulai menunjukkan perbaikan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, terutama rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat serta belum optimalnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 melalui analisis beberapa rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Total aset meningkat 5,31% kewajiban menurun sebesar 4,95% dan ekuitas bertambah sebesar 6,07%. Selain itu, pendapatan daerah naik 5,12%, sedangkan belanja daerah menurun sebesar 8,18%, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp.10,77 miliar. Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 15,66% menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup besar. Rasio efektivitas PAD sebesar 39,49% menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 98,33% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah berjalan cukup baik dan efisien. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, namun pemerintah daerah masih perlu meningkatkan daerah masih perlu meningkatkan potensi PAD agar mapu memperkuat kemandirian fiskal di masa mendatang.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Dearah, LKPD, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi.

PENDAHULUAN

Kota Sibolga adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatra Utara dan memiliki posisi yang cukup strategis di wilayah pantai barat Pulau Sumatra. Letak geografis yang berada dikawasan pesisir menjadi Kota Sibolga memiliki peranan penting dalam aktivitas perdagangan, jasa, dan perikanan. Posisi tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sibolga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah sesuai kebutuhan

pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, penyediaan fasilitas umum, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran. LKPD menjadi salah satu sumber informasi yang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah secara menyeluruh. Melalui laporan ini dapat diketahui perkembangan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, serta hasil akhir pengelolaan anggaran. Dari data tersebut, dapat dilakukan analisis untuk menilai tingkat kesehatan keuangan daerah dan kualitas pengelolannya. Berdasarkan LKPD Tahun Anggaran 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan perkembangan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total aset daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp.1,739 triliun, meningkat dari Rp.1,657 triliun pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 5,31% ini menunjukkan adanya penambahan kekayaan daerah berasal dari pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, serta investasi pemerintah daerah.

Bertambahnya aset ini menjadi indikator bahwa pemerintah terus melakukan Penguatan kapasitas daerah dalam mendukung pelayanan publik. Selain aset yang mengalami peningkatan, kewajiban daerah justru mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah kewajiban tercatat sebesar Rp.114,17 miliar, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi Rp.108,52 miliar atau berkurang sebesar 4,95%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola beban kewajiban dengan lebih baik. Kondisi tersebut tentu memberi dampak positif karena semakin kecil kewajiban, maka risiko keuangan daerah juga akan semakin rendah. Di sisi lain, ekuitas daerah mengalami kenaikan dari Rp.1,537 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp.1,630 triliun pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 6,07%. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan bahwa kekayaan bersih pemerintah daerah semakin kuat. Hal ini menjadi salah satu indikator penting bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga semakin stabil dan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mendukung pembangunan daerah. Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai Rp.645,71 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp.614,23 miliar. Kenaikan sebesar 5,12% ini menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan daerah, baik dari dana transfer pemerintah pusat maupun dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, jika dilihat dari struktur pendapatan, sebagian besar masih didominasi oleh dana transfer. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Sibolga masih belum kuat dan masih memerlukan upaya peningkatan PAD. Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp.634,94 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp. 691,53 miliar. Penurunan sebesar 8,18% ini menunjukkan adanya pengendalian anggaran yang lebih baik oleh pemerintah daerah. Efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah agar pengeluaran tetap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Perubahan yang cukup signifikan terlihat pada hasil akhir anggaran daerah. Pada tahun 2023 pemerintah Kota Sibolga masih mengalami defisit sebesar Rp.77,30 miliar, namun pada tahun 2024 kondisi tersebut berubah menjadi surplus Rp.10,77 miliar. Perubahan ini menjadi bukti bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah mengalami perbaikan yang cukup besar. Surplus anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja secara lebih baik. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif. Peningkatan aset, penurunan kewajiban, bertambahnya ekuitas, naiknya pendapatan, serta penurunannya belanja menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih perlu menggali dan mengoptimalkan potensi PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer

pusat dapat dikurangi. Dengan demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah dapat semakin meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kondisi kinerja keuangan pemerintah kota sibolga berdasarkan data yang ada pada LKPD tahun anggaran 2024. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang diolah berupa angka – angka keuangan yang kemudian dianalisis menggunakan perhitungan rasio keuangan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi LKPD kota sibolga tahun anggaran 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah, lalu menganalisis data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian	2023	2024	Perubahan
Total Aset	Rp. 1,651 Triliun	Rp. 1,739 Triliun	Naik 5,31%
Kewajiban	Rp. 114,17 Milliar	Rp. 108,52 Milliar	Turun 4,95%
Ekuitas	Rp. 1,537 Triliun	Rp. 1.630 Triliun	Naik 6,07%
Pendapatan Daerah	Rp. 614,23 Milliar	Rp. 645,71 Milliar	Naik 5,12%
Belanja Daerah	Rp. 691,53 Milliar	Rp. 634,94 Milliar	Turun 8,81 %
Surplus/Defisit	(Rp. 77,30 Milliar)	Rp. 10,77 Milliar	Meningkat

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai kegiatan pemerintah tanpa ketergantungan yang besar terhadap pihak luar.

Pada pemerintah kota sibolga tahun anggaran 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil di kumpulkan sebesar Rp86,58 Milliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp552,84 Milliar. Berdasarkan data tersebut, diperoleh rasio kemandirian sebesar 15,66%.

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan kota sibolga untuk membiayai kegiatan pemerintah, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan mengandalkan pendapatan daerah sendiri masih cukup rendah. Artinya, dari seluruh sumber pendapatan yang dimiliki, kontribusi PAD masih jauh lebih sedikit dibanding dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kota sibolga masi sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan. Misalnya, untuk membayar belanja pegawai, menyediakan pelayanan public, membangun fasilitas umum, dan melaksanakan program Pembangunan lainnya, pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat mengandalkan uang yang diperoleh dari pajak dan retrebusi daerah.

Meskipun demikian, kondisi seperti ini sebenarnya masig banyak ditemukan pada pemerintah daerah di Indonesia, terutama daerah yang potensi ekonominya belum terlalu besar. Namun, apabila ketergantungan terhadap dana transfer terus berlangsung dalam jangka Panjang, hal tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri. Sebab, apabila terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau jumlah dana transfer mengalami penurunan, maka kemampuan daerah dalam menjalankan program-program juga dapat terganggu.

Oleh karena itu, pemerintah kota sibolga perlu terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai cara, seperti meningkatkan penerimaan pajak daerah,

mengoptimalkan retribusi daerah, memanfaatkan asset daerah yang belum produktif, serta mendorong pertumbuhan investasi agar dapat membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan Tingkat kemandirian keuangan daerah diharapkan semakin meningkat dan ketergantungan pada pemerintah pusat.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Melalui rasio ini dapat diketahui sejauh mana target penerimaan daerah dapat diwujudkan selama periode anggaran berjalan.

Berdasarkan data LKPD kota sibolga tahun 2024, realisasi PAD yang berhasil diperoleh sebesar Rp86,58 Milliar, sedangkan target PAD yang telah ditetapkan sebesar Rp219,25 Milliar. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh rasio efektivitas PAS sebesar 39,49%.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas PAD kota sibolga masih tergolong tidak efektif, karena realisasi pendapatan yang diperoleh belum mencapai setengah dari target yang telah ditentukan. Artinya, pemerintah daerah belum mampu mencapai target penerimaan daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

Hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergali atau belum dikelola secara maksimal. Misalnya, masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai ketentuan, pemungutan retribusi yang belum optimal, atau asset-aset daerah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan tetapi belum dikelola dengan baik.

Rendahnya efektivitas PAD ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, semakin rendah realisasi PAD dibandingkan targetnya, maka semakin sulit bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan. Pemerintah akan semakin bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat karena pendapatan dari daerah sendiri belum mampu memenuhi harapan yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah kota sibolga perlu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber PAD yang belum optimal. Pemerintah juga dapat memperbaiki system pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, memberikan kemudahan pembayaran melalui system digital, serta melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi. Dengan Langkah-langkah tersebut, diharapkan target PAD pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai dengan lebih baik.

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan hubungan antara total belanja yang dikeluarkan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh pemerintah daerah dalam satu periode. Pengukuran rasio ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan.

Berdasarkan data LKPD kota sibolga tahun 2024, total pendapatan daerah yang peroleh sebesar Rp645,71 Milliar, sedangkan total belanja daerah sebesar Rp634,94 Milliar. Dari hasil perhitungan diperoleh rasio efisiensi sebesar 98,33%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota sibolga telah mampu mengelola keuangan daerah dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah pendapatan yang masih lebih besar dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak mengalami kekurangan dana dalam membiayai pengeluarannya selama tahun anggaran 2024.

Kondisi ini dapat diibaratkan seperti seseorang yang mampu mengatur penghasilannya agar tidak lebih kecil daripada pengeluarannya. Walaupun uang yang dimiliki tidak terlalu banyak tersisa, setidaknya pengeluaran masih dapat ditutupi oleh pendapatan yang ada sehingga tidak menimbulkan utang atau deficit yang lebih besar.

Keberhasilan ini juga terlihat dari perubahan kondisi keuangan kota sibolga. Pada tahun 2023 pemerintah daerah masih mengalami deficit sebesar Rp77,30 Milliar, sedangkan pada tahun 2024 berhasil mencatat surplus sebesar Rp10,77 Milliar. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengendalian belanja.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Selisih antara pendapatan dan belanja masih relatif kecil, sehingga apabila terjadi penurunan pendapatan atau peningkatan belanja yang tidak terkendali, kondisi keuangan daerah dapat Kembali mengalami deficit. Oleh karena ini, pemerintah kota sibolga perlu mempertahankan pengelolaan anggaran yang efisien, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan belanja, serta terus mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah agar kemampuan fiskal daerah menjadi lebih kuat dan stabil di masa mendatang.

Analisis Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan proporsi alokasi anggaran yang digunakan untuk kebutuhan operasional dan pembangunan aset daerah. Melalui rasio ini dapat diketahui fokus kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024, diketahui bahwa bagian belanja operasi masih lebih banyak dibandingkan anggaran belanja modal. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih dipakai untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional pemerintahan. Misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta berbagai kegiatan rutin lainnya.

Kondisi tersebut sebenarnya masih cukup umum terjadi pada banyak pemerintah di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara optimal.

Belanja modal memiliki peran yang penting karena berkaitan dengan pembangunan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pembangunan jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pengadaan aset tetap lainnya. Karena itu, Pemerintah Kota Sibolga perlu terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024 mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari kenaikan total aset sebesar 5,31%, penurunan kewajiban sebesar 4,95%, peningkatan ekuitas sebesar 6,07%, serta perubahan kondisi dari defisit sebesar Rp77,30 miliar pada tahun 2023 menjadi surplus sebesar Rp10,77 miliar pada tahun 2024.

Hasil analisis rasio kemandirian menunjukkan nilai sebesar 15,66%, yang berarti tingkat kemandirian keuangan daerah masih cukup rendah karena pendapatan daerah masih banyak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, nilai efektivitas PAD sebesar 39,49% menunjukkan bahwa pendapatan yang berhasil direalisasikan masih belum mencapai target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, rasio efisiensi sebesar 98,33% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik karena pendapatan yang diperoleh masih mampu menutupi belanja yang dikeluarkan. Secara umum, kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2024 dapat dikatakan mengalami perbaikan. Namun, peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal daerah tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan agar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat semakin meningkat pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2021. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Sibolga. 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.